

# GAYUS DAN



Oleh: Adrianus Meliala \*)

**T**IDAK banyak orang dari luar Polri yang bisa merepotkan organisasi sebesar Polri, apalagi berkali-kali. Khususnya ketika orang itu sebetulnya bukan siapa-siapa, maka aktivitas Gayus Halomoan Tambunan kini sungguh luar biasa. Tidak kurang dari satu komjen, dua brigjen dan dua pamen yang kerepotan dibuatnya karena berkali-kali harus menghadiri persidangan profesi dan persidangan pidana, sampai akhirnya dijatuhi hukuman.

Itu terjadi sekitar setahun lalu ketika kasus Gayus mulai terkuak terkait data yang diungkap PPAK. Dan kini, seolah belum puas, seorang pamen dan delapan brigadir kini harus menjadi pesakitan dan siap-siap terkena hukuman berat. Itu karena akses ilegal yang diterimanya dari para polisi penjaga rutan agar bisa keluar dari selnya.

Sebagaimana telah banyak dilansir, substansi kemampuan Gayus merepotkan Polri adalah pada kekuatan uangnya. Jumlah uang dari mantan pegawai Ditjen Pajak berpangkat IIIA itu diyakini masih puluhan hingga seratusan milyar rupiah. Uang itu pada awalnya adalah uang titipan dari berbagai pihak yang memanfaatkan "jasanya" dan sedianya hendak diberikan untuk pihak lain di lingkungan Ditjen Pajak tersebut. Namun, dengan terbongkarnya skandal pajak tersebut, tidak ada orang yang mengaku telah memberi uang dan, apalagi, tidak ada yang mengaku akan menerima uang itu dari Gayus.

Jadilah Gayus kaya mendadak. Padahal, uang yang harus dipertanggungjawabkan di muka hukum (dan kemungkinan besar akan dirampas oleh negara) hanya beberapa ratus juta rupiah. Bagusnya, setahun yang lalu uang ratusan milyar itu masih dibekukan. Namun, atas perintah seorang brigjen polisi, uang itu pun dicairkan. Selanjutnya, merdekalah Gayus dan istri mencuci uangnya dengan beragam cara. Termasuk di antaranya, dengan gonta-ganti kendaraan sebagaimana diberitakan oleh sebuah koran

nasional.

Di pihak lain, kelemahan merata anggota Polri (menurut penulis) pada umumnya tinggal satu, yakni tidak tahan godaan uang. Sehingga, bertemu tersangka dan tahanan seperti Gayus, langsung dijadikan "ATM" alias penyedia uang tunai bagi anggota-anggota kepolisian. Untuk bisa bertemu istri di tahanan, uang diminta. Untuk tidak kembali ke tahanan setelah diperiksa di pengadilan, uang diminta. Untuk tidak ditempatkan di sel yang ramai, uang diminta. Untuk bisa keluar sel (dan pergi ke Bali), kembali uang diminta. Walaupun pada dasarnya Gayus dieksploitasi, tapi bagi si tahanan hal itu pada dasarnya transaksi.

Mengapa uang adalah kelemahan merata anggota Polri, dapat dicari jawabannya dari beberapa cara pandang sebagai berikut:

Pertama, era "anggaran susah" semasa Polri dibawah ABRI masih terlihat jejaknya hingga sekarang. Puluhan tahun bekerja dengan anggaran yang sama sekali tidak cukup telah mengembangkan bukan hanya cara kerja, juga bukan hanya budaya kerja tetapi telah mencapai apa yang disebut nilai kerja (working value). Sebutan "...pintar-pintarnya sajalah..." atau "...diatur bagaimana caranyalah..." dalam hal ini melambangkan nilai kerja yang sama sekali tidak cocok dengan prinsip-prinsip good governance.

Kalau kita dengar pembicaraan yang berkembang selama persidangan dua pamen yang disangka menerima suap dari Gayus, kuat dugaan bahwa hal itu bukan sesuatu yang oleh kalangan kepolisian dianggap negatif, salah atau melanggar hukum. Tentunya anggapan itu muncul sebelum hal itu ketahuan.

Kedua, berkaitan dengan yang pertama, maka hubungan Polri dan masyarakatnya menjadi tidak pernah tulus, karena ditandai dengan dijadikannya kewenangan sebagai komoditi. Polri melihat masyarakat sebagai pihak yang mampu memberi anggaran yang mereka butuhkan demikian pula uang yang bisa dibawa pulang – keduanya dipoles dengan

# SETITIK NILA



sebutan "partisipasi masyarakat". Menyadari itu, amat banyak masyarakat yang lalu bersedia saja memberi uang kepada polisi (mulai dari denda "damai" lalu lintas hingga penangguhan perkara) yang sejak awal memang telah bersedia menukar kewenangannya.

Kembali dapat kita perhatikan bahwa, secara substansi, perbuatan Gayus sebenarnya tidak ada bedanya dengan kebanyakan anggota masyarakat lainnya. Makin tinggi pangkat, makin serius masalah atau makin luas kewenangan yang hendak dipertukarkan, maka makin besar pula uang yang bisa disediakan oleh anggota masyarakat.

Ketiga, walau telah melakukan diagnosis atas kelemahan diri sendiri, menurut saya, Polri tidak atau belum habis-habisan menjauhkan diri dan anggotanya dari kemungkinan godaan uang. Pada konteks penerimaan anggota misalnya, demikian pula pada fungsi lalu-lintas, penulis melihat kesungguhan itu ada. Berbagai cara diupayakan agar korupsi tidak terjadi. Pada keduanya telah tercipta sistem yang sedemikian rupa sehingga setiap personil terawasi dari sisi penerimaan dan penggunaan keuangan. Juga diciptakan sistem agar tidak ada satupun personil yang memiliki kewenangan sedemikian besar atau luas. Sayangnya, hal ini tidak terlihat

pada fungsi reserse.

Pada fungsi reserse ini, manajemen tradisional nampaknya secara sengaja dibiarkan terus berlangsung. Yang disebut manajemen tradisional dalam hal ini adalah hidupnya anggapan bahwa penanganan kasus itu sepenuhnya terkait kemauan serta kewenangan si penyidik. Bagaimana saya menjalankan, dan apa hasil akhirnya, itu juga terserah si penyidik. Dengan kata lain, personalitas penyidik masih amat besar sehingga tetap berpotensi menyimpangkan kontak yang selama itu sudah terjadi antara penyidik dengan tersangka (atau pengacaranya).

Penyakit yang satu ini diperparah dengan beberapa karakteristik khas kepolisian apabila terdapat anggotanya yang berperilaku menyimpang atau bahkan jahat. Apa itu?

Karakteristik pertama, bahwa berbeda dengan militer dimana ruang bagi penyimpangan pribadi amat terbatas, pada kepolisian tidaklah demikian. Seorang brigadir pun pada dasarnya mampu berbuat penyimpangan bernilai rupiah amat besar, dan sekaligus menggegerkan organisasinya. Hal itu sesuai dengan karakter kepolisian yang soliter, dimana setiap personil polisi adalah representasi hukum sekaligus organisasinya. Dengan kata lain, ketika masing-masing anggota Polri tetap

saja tidak mampu mengendalikan diri dalam hal uang, setiap kali pula Polri sebagai organisasi akan terdera hebat. Jadi, tidak perlu banyak, cukup nila setitik untuk menggoyang organisasi Polri.

Karakteristik kedua, bahwa berbeda dengan penyimpangan di militer dimana masih terdapat kesan menutupi (entah atas nama semangat korps atau yang lain), tidak demikian halnya dengan kepolisian. Walau mungkin tak kalah kotor, komunitas kepolisian cenderung tega "membuang" anggotanya yang menyimpang itu. Walaupun ada hubungan tidak langsung dengan pejabat di atasnya, maka personil bawahan lebih cenderung dikorbankan. Kilahnya adalah, "...satu anggota kotor tidak usah dipertahankan. Masih ada ratusan ribu anggota yang baik." Kecenderungan ini menjadikan kasus-kasus penyimpangan lebih mudah tercuat ke permukaan dan, selanjutnya, dipersepsikan sebagai tambah banyak dari waktu ke waktu.

Karakteristik ketiga, peran kepemimpinan (leadership) dari berbagai level seringkali bergerak antara "ada dan tiada" (atau elusive). Sulit untuk mendefinisikan apa itu kepemimpinan yang baik dalam lingkup organisasi kepolisian. Apakah yang semata-mata berani, jujur dan akuntabel itu dianggap teladan? Ataupun yang baik itu adalah yang mengayomi anak buah, memberi kesejahteraan dan memperbaiki fasilitas (walaupun tidak jelas asal-usul dananya)?

Menyadari tiga masalah Polri terkait uang serta menyadari tiga karakter komunitas polisi jika ada yang ketahuan main uang, masak sih Polri masih tidak mau serius membenahi diri? Adakah menunggu cobaan lain yang lebih berat dari masalah Gayus? Wallahuallah.

Adrianus Meliala  
adrianus@ui.ac.id